

Implementation of Distribution of Cash Social Assistance Funds for Communities Affected by Covid-19 in Subdistricts

Lasiana - Kupang City

Eleteria Febiana Hadi^{1*}, Nikson Tameno², Cicilia A. Tungga³

Universitas Nusa Cendana

Corresponding Author: Eleteria Febiana Hadi hadieltrin@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Implementation,
Cash Social Assistance,
Covid-19

Received : 2 September

Revised : 15 September

Accepted: 16 October

©2023 Hadi, Tameno, Tungga: This is
an open-access article distributed under
the terms of the [Creative Commons
Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This research was conducted to find out how the distribution of BST funds was implemented for communities affected by Covid-19 in Lasiana Village and also to find out what the driving and inhibiting factors were in distributing this aid. The data used in this research is primary data and also secondary data, which is then analyzed using qualitative descriptive analysis methods. The data collection techniques used in this research used interview, observation and documentation techniques using Edward III's policy implementation theory. The results of this research show that the implementation of BST distribution in Lasiana Subdistrict has not been optimal in accordance with the 4 supporting factors in implementation in accordance with Edward's policy theory which consists of communication which is shown by the existence of an appeal to residents in using aid so that they are wise in using aid but also in conveying related information. The schedule and conditions for distribution of aid have not yet reached all residents who receive aid, then the resources are where human resources in terms of quantity are adequate but in terms of quality are still lacking, the aid has been received by residents and in terms of budget it is sufficient for the needs of residents, then the disposition of the distribution of this aid The implementer's attitude is very good in terms of service and ease in the process of collecting aid, and the bureaucracy of the government concerned is not yet fully on target in distributing this aid because it has not updated the population's social data

Implementasi Penyaluran Dana Bantuan Sosial Tunai bagi Masyarakat yang Terdampak Covid-19 di Kelurahan Lasiana- Kota Kupang

Eleteria Febiana Hadi^{1*}, Nikson Tameno², Cicilia A. Tungga³

Universitas Nusa Cendana

Corresponding Author: Eleteria Febiana Hadi hadieltrin@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Implementasi, Bansos Tunai, Covid-19

Received : 2 September

Revised : 15 September

Accepted: 16 October

©2023 Hadi, Tameno, Tungga: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyaluran dana BST bagi masyarakat terdampak Covid-19 di Desa Lasiana dan juga untuk mengetahui apa saja faktor pendorong dan penghambat penyaluran bantuan tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan juga data sekunder, yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyaluran BST di Kecamatan Lasiana belum optimal sesuai dengan 4 faktor pendukung dalam pelaksanaannya sesuai dengan teori kebijakan Edward yang terdiri dari komunikasi yang ditunjukkan dengan adanya imbauan kepada warga di Kecamatan Lasiana. menggunakan bantuan agar mereka bijak dalam menggunakan bantuan namun juga dalam menyampaikan informasi terkait. Jadwal dan syarat penyaluran bantuan belum menjangkau seluruh warga penerima bantuan, maka sumber daya adalah dimana sumber daya manusia dari segi kuantitas sudah memadai namun dari segi kualitas masih kurang, bantuan sudah diterima warga dan dari segi anggaran cukup untuk kebutuhan warga, maka disposisi penyaluran bantuan ini Sikap pelaksana sangat baik dalam hal pelayanan dan kemudahan dalam proses pengumpulan bantuan, serta birokrasi pemerintah yang bersangkutan belum sepenuhnya tepat sasaran dalam menyalurkan bantuan ini karena belum mengupdate data sosial penduduk

PENDAHULUAN

Pandemi covid yang terjadi di akhir tahun 2019 dan mulai menyebar di negara Indonesia pada awal bulan Maret tahun 2020 tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi berampak juga terhadap berbagai aspek kehidupan lain, seperti pada aspek sosial ekonomi yang berpengaruh pada kesejahteraan warga. Dalam jangka pendek, dampaknya pada kesehatan ditunjukkan dengan angka kematian korban di Indonesia yang mencapai 8,9 persen. Perekonomian Indonesia pada triwulan I-2020 mengalami keterlambatan dibanding triwulan I-2019 yakni dari 5,07 persen menjadi 2,97 persen (bps.go.id, 2020). Selain itu, banyak pekerja yang di PHK, usaha-usaha yang terpaksa gulung tikar, penurunan penghasilan bagi para pedagang, ojek online, supir angkutan umum dan lain sebagainya.

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial pada pasal 1 ayat 1 dimana untuk memenuhi kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Salah satu program bantuan dari pemerintah adalah Bantuan Sosial Tunai (BST). Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan salah satu wujud kebijakan pemerintah dalam penanggulangan peningkatan angka kemiskinan masyarakat. Program bantuan tersebut dibuat karena pada masa pandemi Covid-19 banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan tidak memperoleh pendapatan sejak diberlakukannya kebijakan PSBB dan lain sebagainya.

Terbitnya Peraturan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang pelaksanaan atau Implementasi Bantuan Sosial Sembako dan Implementasi Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona virus disease 2019 (Covid-19), semakin memperjelas bahwa untuk mewujudkan masyarakat miskin yang sejahtera kebijakan tersebut harus betul-betul mampu mengatasi kemiskinan. Menurut George C. Edward III dalam mengukur implementasi kebijakan terdapat 4 faktor pendukung yang menjadi poin penting agar implementasi dapat berjalan dengan baik. Faktor tersebut terdiri dari komunikasi yang merupakan proses penyampaian informasi dalam menjalankan kebijakan, faktor sumber daya yang merupakan segala sumber digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, faktor disposisi yang merupakan hal yang berkaitan dengan perilaku atau karakteristik pelaksanaan kebijakan dan yang terakhir faktor struktur birokrasi yang merupakan hal yang berkaitan dengan mekanisme kebijakan. Kecamatan Kelapa Lima adalah salah satu kecamatan di kota Kupang dengan jumlah penerima bantuan yang banyak pada masa pandemi covid-19. Berikut Tabel 1 data jumlah penerima bantuan sosial tunai (BST) di Kecamatan Kelapa lima dalam angka tahun 2020 yang terdiri dari beberapa kelurahan yang diambil sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Penerima Bantuan Sosial Tunai Covid-19 dan Jumlah Penduduk di Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Tahun 2020

Kelurahan	Jenis Bantuan	Jumlah Penerima Bantuan	Jumlah Penduduk
Oesapa	BST	739 Orang	30.032 Jiwa
Oesapa Barat	BST	333 Orang	11.879 Jiwa
Oesapa Selatan	BST	226 Orang	4.621 Jiwa
Lasiana	BST	443 Orang	14.897 Jiwa
Kelapa Lima	BST	377 Orang	17.422 Jiwa

Sumber : Kecamatan Kelapa Lima, 2023

Peneliti ingin meneliti mengenai implementasi bantuan sosial tunai yang terjadi di kelurahan Lasiana kota-Kupang karena masih ada warga miskin di kelurahan tersebut yang tidak menerima bantuan dari pemerintah pada masa pandemi hal tersebut dikarenakan nama mereka tidak terdata dipusat. Warga juga kurang mengetahui apa saja kriteria atau syarat untuk menerima bantuan tersebut dan juga bagaimana proses pendataan bantuan tersebut. Masyarakat juga tidak mendapatkan sosialisasi mengenai bantuan tersebut. Maka dari itu peneliti memilih kelurahan Lasiana kota-Kupang sebagai objek dari penelitian ini.

Tabel 2 menunjukkan data penerima BST di Kelurahan Lasiana, Kota Kupang.

Tabel 2. Jumlah Penerima Bantuan Sosial Covid-19 di Kelurahan Lasiana-Kota Kupang Tahun 2020-2022

Tahun	Jenis Bantuan	Jumlah Penerima Bantuan
2020	Bantuan Sosial Tunai (BST)	443 Orang
2020	Sembako	726 Orang
2020	Program Keluarga Harapan (PKH)	645 Orang

Sumber : Kelurahan Lasiana, 2023

Dapat dilihat bahwa jumlah penerima BST merupakan jenis bantuan dengan jumlah penerima bantuan paling sedikit jika dibandingkan dengan penerima sembako dan PKH. Maka dari itu peneliti ingin meneliti terkait dengan penyaluran BST yang terjadi di kelurahan Lasiana Kota-Kupang, dimana penerima BST terbilang paling sedikit dibandingkan jenis bantuan lain. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji masalah tersebut secara lebih mendalam dengan melakukan sebuah penelitian yang berjudul "Implementasi Penyaluran Dana Bantuan Sosial Tunai bagi yang Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kelurahan Lasiana-Kota Kupang".

TINJAUAN PUSTAKA

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah antara lain dengan menerapkan kebijakan *physical distancing*, *work from home (WFH)*, penggantian kegiatan belajar mengajar dari tatap muka menjadi daring kepada seluruh tingkat pendidikan baik formal maupun non formal, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan berbagai upaya lainnya. Pemerintah juga membuat kebijakan yang bisa membantu masyarakat secara langsung. Berbagai bentuk bantuan diberikan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk seperti uang tunai, sembako dan lain sebagainya yang pada saat seperti itu tentu banyak dibutuhkan oleh masyarakat yang terimbas dampak pandemi Covid-19 dan disalurkan dengan harapan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tujuan utama dari adanya bantuan-bantuan tersebut untuk membantu kelompok rentan yang terdampak dari adanya pandemi Covid-19 ini.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dimana data yang diperoleh dari hasil wawancara dianalisis sesuai dengan metode yang digunakan kemudian diinterpretasikan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survei, penelitian survei digunakan untuk mendapatkan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan teknik reduksi data, kemudian penyajian data dan terakhir melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Teori yang digunakan yaitu teori dari Edward III yang terdiri dari 4 faktor untuk mengukur keberhasilan implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi kemudian dikaitkan dengan hasil temuan peneliti di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Pandemi Covid-19 yang Dirasakan Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara bersama beberapa narasumber di kelurahan Lasiana yakni warga tersebut dapat dilihat bahwa akibat munculnya pandemi Covid-19 memberikan berbagai dampak yang merugikan warga, terutama pada perekonomian warga kelurahan Lasiana. Akibat munculnya pandemi Covid-19 warga di kelurahan Lasiana kesulitan untuk melakukan pekerjaan mereka, karena harus tetap berada dirumah untuk menjaga jarak dengan warga lain agar terhindar dari penyebaran virus. Situasi tersebut membuat warga resah karena jika harus tetap berada dirumah, maka mereka juga sulit memperoleh penghasilan. Penghasilan yang diperoleh warga semakin berkurang sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup selama masa pandemi juga sulit. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada saat pandemi juga berpengaruh pada kondisi sosial maupun ekonomi, dimana harus membatasi hubungan sosial ataupun membatasi pergerakan mereka bersama warga lainnya untuk menghindari penyebaran Covid-19. Kebijakan itu sendiri terdiri dari PSBB, Sosial Distancing yakni warga harus menjaga jarak dengan warga lain atau tidak melakukan hubungan sosial dengan warga lain dan juga Work From Home yakni harus bekerja dari rumah.

Semenjak pemerintah mengeluarkan adanya kebijakan program program Bantuan Sosial Tunai (BST) pada masa pandemi warga merasa terbantu. Kondisi para penerima manfaat sebelumnya menggambarkan bahwa mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, namun dengan adanya bantuan tersebut warga bisa terbantu karena program bantuan tersebut meringankan beban perekonomian mereka. Bahkan dengan adanya bantuan tersebut warga juga masih bisa memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak mereka. Sehingga beban perekonomian warga di kelurahan tersebut dapat diringankan dengan adanya bantuan tersebut. Keadaan tersebut sejalan dengan UU No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pada pasal 1 ayat 1 dimana untuk memenuhi kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya

Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST)

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama kepala penanganan fakir miskin Dinas Sosial Kota Kupang peneliti menganalisis bahwa komunikasi yang dilakukan dari pihak Dinas Sosial dilakukan dengan penyampaian informasi kepada masyarakat bahwa penyaluran bantuan yang dilakukan oleh pemerintah setempat memperhatikan berbagai ketentuan-ketentuan yang dibuat. Ketentuan-ketentuan tersebut meliputi formulir yang berisi 44 pertanyaan terkait data sosial penduduk untuk diisi oleh masyarakat sehingga dari pihak penyelenggara dapat menilai masyarakat yang berhak dinyatakan sebagai KPM, hal itu merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat agar layak menerima bantuan. Dari Kementerian Sosial juga akan diverifikasi kembali untuk dilihat apakah data masyarakat tersebut layak atau sudah valid untuk menerima bantuan. Setelah itu baru akan dikirim kembali ke daerah-daerah bersangkutan yang menerima bantuan. Ketentuan tersebut sendiri merupakan syarat atau acuan bagi pemerintah untuk menentukan masyarakat miskin seperti apa yang layak menerima bantuan.

Dari pihak kelurahan juga memberikan informasi terkait himbuan mengenai bagaimana sebaiknya bantuan tersebut dipergunakan sesuai dengan tujuan dibuatnya program BST tersebut, sehingga warga lebih terarah dan menggunakan bantuan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan selama masa pandemi Covid-19. Dalam proses implementasi kesediaan informasi terkait penyaluran bantuan merupakan faktor penting yang mendukung jalannya penyaluran bantuan. Hal tersebut dapat membantu warga untuk mengetahui terkait apa saja yang merupakan syarat dalam pencairan dana bantuan.

2. Sumber Daya

Dalam proses penyaluran bantuan yang dilaksanakan di kantor Pos disediakan pendamping sosial atau disebut TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) untuk mendampingi para penerima manfaat pada saat berlangsungnya penyaluran. Selain itu, ketersediaan atau peran dari SDM yakni pihak kantor lurah itu sendiri sangat membantu dalam proses implementasi bantuan tersebut dimana mereka bertanggung jawab merekap nama-nama penerima bantuan sehingga dapat terarah siapa yang berhak atau tidak terjadi kekeliruan nama. Adapun anggaran yang disediakan dan berasal dari

Kementerian Sosial. Anggaran yang diberikan kepada masyarakat dirasa cukup untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat selama masa pandemi, dimana masyarakat bisa membeli kebutuhan hidup, memenuhi.

Fasilitas dalam proses implementasi fasilitas yang dirasakan warga masih kurang, hal tersebut diperkuat dengan adanya pernyataan warga dimana kapasitas ruangan yang kurang luas tetapi jumlah warga yang harus mengantri dalam proses pencairan bantuan itu banyak. Sehingga warga harus menumpuk didalam ruangan kantor pos pada saat pencairan.

3. Disposisi

Pada saat proses pencairan bantuan warga merasa bahwa pelayanan yang diberikan oleh pihak penyalur sangat baik terhadap mereka, baik sikap koordinator penyaluran bantuan yang merupakan pendamping maupun sikap para pihak kantor Pos sehingga mereka merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan.

4. Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa warga di kelurahan Lasiana yang tidak menerima bantuan, mereka beranggapan bahwa data yang digunakan dari pusat belum relevan jika digunakan pada masa pandemi Covid-19. Dalam hal ini data yang digunakan bukanlah data yang sudah diperbaharui atau datanya belum valid sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu dimana terjadi peningkatan masyarakat miskin dan masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat munculnya pandemi, tetapi dari pusat masih menggunakan data lama atau nama-nama tersebut merupakan nama-nama penerima bantuan yang sudah pernah ada sebelumnya yang belum diperbaharui oleh pusat kemensos.

Kebermanfaatan Program BST

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama warga penerima bantuan di Kelurahan Lasiana dapat dilihat bahwa mereka merasa terbantu dengan adanya program bantuan ini, apalagi disaat pandemi banyak warga yang perekonomiannya sangat menurun khususnya warga miskin. Dengan adanya program bantuan ini, warga penerima bantuan di Kelurahan Lasiana tersebut rata-rata memanfaatkan bantuan tersebut untuk membantu pemenuhan kebutuhan hidup rumah tangga mereka. Bantuan tersebut banyak digunakan untuk membeli bahan pokok mereka seperti membeli beras dan lauk untuk sehari-hari, untuk membeli kebutuhan sekolah anak mereka dan juga ada yang menggunakan bantuan tersebut untuk menambah modal usaha mereka.

Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi BST

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama pihak Dinas Sosial dan juga pihak kelurahan terdapat beberapa faktor pendorong dalam proses implementasi penyaluran bantuan. Dalam proses implementasi penyaluran BST, yang merupakan faktor pendorong yakni dengan adanya SDM yang merupakan penanggung jawab proses penyaluran bantuan ataupun tenaga kerja yang dapat dipercaya dalam proses kerja tersebut, lalu anggaran sesuai dengan yang diharapkan dan juga regulasi yang baik agar dapat mengontrol warga dengan aturan yang dibuat untuk keperluan warga itu sendiri. Himbauan dan juga informasi yang jelas dari pihak Kelurahan maupun RT/RW sekitar yang selalu

menginformasikan terkait apa saja syarat bantuan tersebut dan juga bagaimana prosedur pengambilan bantuan.

Tetapi dalam pelaksanaan program BST yang terjadi di Kelurahan Lasiana terdapat juga faktor yang menghambat jalannya implementasi BST. Beberapa hambatan yang biasa terjadi adalah masalah informasi dari berbagai pihak, misalnya dari pihak Kementerian Sosial yang belum jelas ataupun dari pihak Dinas Sosial maupun Pihak Kelurahan tersebut. Dimana hal tersebut berkaitan dengan visi jadwal penyaluran bantuan. Selain itu sarana dan prasarana yang masih kurang, seperti ruangan kantor pos yang kurang luas dan tidak bisa menampung banyak KPM sehingga menyebabkan penumpukan warga diruangan tersebut. Adapun masalah lain yang dihadapi dimana informasi yang disampaikan petugas tidak sampai kepada semua warga penerima bantuan. Hal tersebut dikarenakan informasi yang mereka sampaikan kepada warga idealnya menggunakan media yakni seperti HP, sementara tidak semua warga penerima bantuan memiliki barang tersebut. Sehingga terkadang pada saat mereka memberikan informasi tidak semua warga mengetahui informasi tersebut. Hal ini berkaitan dengan teori yang digunakan yakni Komunikasi merupakan salah satu faktor pendukung dalam implementasi, tetapi pada program ini komunikasi hanya dilakukan dengan menggunakan HP tanpa memikirkan warga lain yang tidak memiliki barang tersebut. Dalam hal ini komunikasi informasi antara pihak petugas dan warga masih kurang.

Dari pihak warga yang menerima bantuan juga merasa ada beberapa kendala yang dialami pada saat penyaluran bantuan. Hambatan yang dialami masyarakat dalam penyaluran bantuan tersebut terdapat pada proses pencairan yang cukup lama yang membuat mereka harus menunggu lama untuk menerima bantuan dan juga informasi yang tak tersampaikan kepada beberapa warga penerima bantuan yang dikarenakan mereka tidak memiliki media untuk mengakses informasi.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan sebagai berikut:

Implementasi penyaluran BST di kelurahan Lasiana pada masa Pandemi Covid-19 belum berjalan maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari faktor pendukung implementasi, yaitu komunikasi yang telah dilakukan dimana walaupun adanya himbauan kepada warga dalam memanfaatkan bantuan supaya bijak namun, dalam penyampaian informasi terkait jadwal maupun syarat penyaluran bantuan belum sampai kesemua warga penerima bantuan, kemudian sumber daya dimana SDM dari segi kuantitasnya sudah cukup dalam proses implementasi tetapi dari segi kualitasnya masih kurang karena belum maksimal dalam proses pendataan warga miskin, dari segi anggaran sudah mencukupi sesuai kebutuhan warga, selanjutnya disposisi yang merupakan sikap pelaksana program yang dinilai baik dalam pelayanan dan kemudahan dalam proses pengambilan bantuan, yang terakhir adalah birokrasi dimana pemerintah bersangkutan belum sepenuhnya tepat sasaran dalam penyaluran bantuan ini karena belum melakukan pembaharuan data sosial penduduk.

Adapun faktor pendorong dan penghambat dalam penyaluran BST di Kelurahan Lasiana. Faktor pendorong berupa SDM yang jumlahnya cukup

memadai untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyaluran bantuan, anggaran yang sesuai dengan kebutuhan warga, dan himbauan kepada warga dalam memanfaatkan bantuan yang ada dari pihak Kelurahan maupun RT/RW. Kemudian adapun faktor penghambat dalam implementasi penyaluran BST di kelurahan Lasiana dimana informasi terkait syarat dan prosedur pengambilan bantuan yang disampaikan petugas tidak sampai kepada semua warga penerima bantuan, dan juga data yang digunakan di pusat belum mencakup semua warga miskin, dan sarana prasarana yang masih kurang.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak terkait, diantaranya:

1. Diharapkan pemerintah setempat lebih memperhatikan lagi mengenai data sosial penduduk dan melakukan pembaharuan data terkait warga miskin yang seharusnya berhak menerima bantuan agar program penyaluran manfaat yang diberikan bisa lebih tepat sasaran. Diharapkan juga bagi petugas dari kelurahan dan juga RT/RW untuk lebih berinisiatif yakni dengan memeriksa kembali nama-nama penerima bantuan agar dapat memastikan apakah warga miskin di kelurahan tersebut sudah termasuk sebagai penerima manfaat atau belum, sehingga jika sebagian warga belum masuk dalam data sebagai penerima bantuan pihak kelurahan bisa mengirim kembali data mereka kepusat.
2. Diharapkan warga bijak dalam memanfaatkan bantuan sesuai dengan tujuan dibuatnya program BST dan juga seperti yang telah dihimbaukan oleh pemerintah yaitu untuk pemenuhan kebutuhan hidup mereka, sehingga setiap bantuan yang diterima dapat menghasilkan dampak sesuai dengan yang diharapkan.

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar dapat meneliti menggunakan lebih banyak informan, serta menggunakan teori lain seperti teori yang dikemukakan oleh Grindle dimana keberhasilan implementasi diukur dari faktor proses kebijakan apakah sudah sesuai dengan yang ditentukan dan juga faktor tingkat keterlaksanaan kebijakan yakni berupa isi kebijakan dan lingkungan implementasi, sehingga mendapatkan keterbaruan yang akurat dan lebih baik lagi dalam meneliti penelitian yang sama.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan maka perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait topik implementasi penyaluran dana bantuan sosial tunai bagi masyarakat yang terdampak covid-19 di kelurahan lasiana- kota kupang demi menyempurnakan penelitian ini dan meneambah wawasan pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhika, Achmad. (2022). Efektivitas Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Pondok Aren. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Diakses pada 10 Februari 2023.
- Barani, dkk. (2020). Analisis Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Warga Tanah Laut Pada Masa Pandemi Covid-19. Diakses Pada 19 Februari 2021.
- Basrowi, dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Cipta.
- Creswell, Jhon W. 2009. Research Desing (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed). Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Dewi, Dian Suluh Kusuma. (2022). Kebijakan Publik Proses , Implementasi dan Evaluasi. Yogyakarta. Samudra Biru.
- Febiola, Dwi Ayu. (2021). Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Bagi Warga Yang Terdampak Covid-19 (Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu). Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang. Diakses pada 19 Februari 2021.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 Ayat 1 dimana untuk memenuhi kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
- Keputusan Direktur Jenderal Nomor 18/6/SK/HK.02.02/4/2020. Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Virus Disease 2019.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia. No.1 Th 2020. Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- Peraturan keputusan Menteri Sosial Republik Indoneia. No.54/HUK/2020. Implementasi Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019.